

**STUDI KOMPARASI TENTANG PENGELOLAAN
MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT
SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Aqidah Apresia

NIM : C04211109



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aqidah Apresia
NIM : C04211109
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pengelolaan Minyak dan Gas
Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



NurAqidahApresia
NIM. C04211109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aqidah Apresia NIM. C04211109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,



Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aqidah Apresia NIM. C04211109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



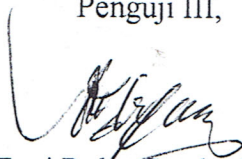
Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji II,



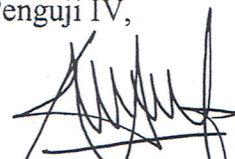
Dr. Hammis Syafaq, M. Fil.I
NIP. 197510162002121001

Penguji III,



Ana Toni Roby Candra Y, M.SEI
NIP. 201603311

Penguji IV,

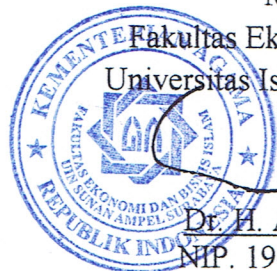


Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Surabaya, 18 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **NUR AQIDAH APRESIA**
NIM : **C04211109**
Fakultas/Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH**
E-mail address : nuraqidahapresia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul :

**STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Penulis

(Nur Aqidah Apresia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Studi Komparasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam serta apa perbedaan mendasar tentang pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kepustakaan. Data dihimpun dengan mengkaji secara mendalam dan menelaah sumber kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Komparatif* yaitu proses untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dengan cara membandingkan dua atau lebih objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *selected index reading* dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah konsep kepemilikan dalam ekonomi kapitalis yaitu diakuiinya kepemilikan individu secara penuh dengan mendasarkan kepada hak kebebasan yang berarti setiap individu boleh memperoleh harta yang sebanyak mungkin dengan cara yang tidak dibatasi (bebas). Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yaitu diakuiinya atas tiga kepemilikan yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara yang dibatasi oleh aturan dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini, pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dapat dimiliki dan dikelola oleh individu secara penuh, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum yang harus dikelola negara dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan simpulan diatas, maka penulis berharap agar sistem ekonomi Islamlah yang menjadi pilihan solusi solutif untuk persoalan ekonomi yang dihadapi negeri ini demi kesejahteraan rakyat dan negara baik di dunia maupun akhirat.

keyword/ kata kunci : minyak, gas bumi, kepemilikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Penurunan <i>Lifting</i> Minyak Bumi.....	5
Gambar 1.2 Defisit APBN 2018	6

Semua yang disebutkan adalah sesuatu yang wajar sebab memang demikian kecenderungan hati manusia yang diciptakan Allah SWT, memiliki harta tidak dilarang dalam Islam karena harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memudahkan pengelolaan dan pelestarian alam, Allah SWT menganugerahkan berbagai fasilitas kehidupan untuk kepentingan seluruh umat manusia misalnya, sungai dan laut sebagai sarana transportasi.

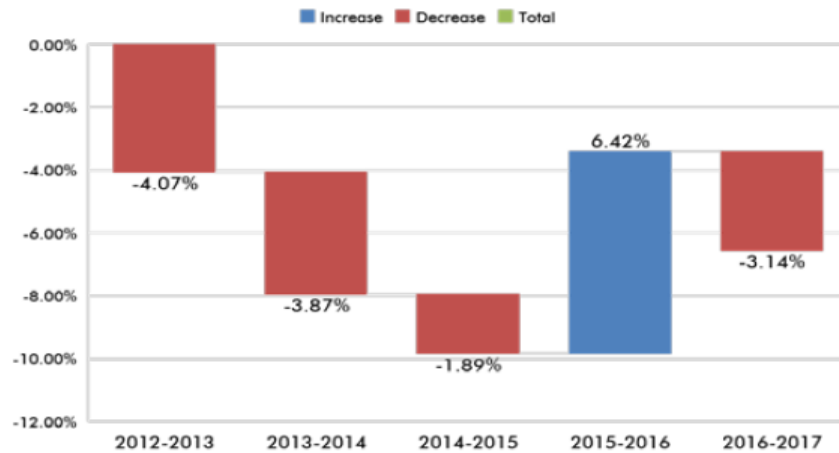
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam yang melimpah ini

[illegible]

Industri minyak di Indonesia telah muncul lebih dari 100 tahun yang lalu, namun baru sejak 1966 industri ini mulai mengalami perkembangan cepat. Perubahan besar terjadi, dengan mulai diterapkannya untuk pertama kali sistem kontrak bagi hasil dengan perusahaan kontraktor asing pada akhir tahun 1960-an. Sejak itu, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas diintensifkan, khususnya dilepas pantai yang sebelumnya terabaikan. Bukti konkret tentang potensi besar minyak dan gas bumi bisa dilihat dari perannya yang signifikan dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi dan bahan baku dalam negeri maupun sebagai sumber penerimaan negara. Dalam kurun waktu 25 tahun pada masa Orde Baru, misalnya, penerimaan negara dari minyak dan gas bumi serta distribusi bahan bakar minyak di dalam negeri jauh melampaui sasaran. Ekspor minyak mentah, produk minyak dan gas bumi juga melebihi sasaran, sehingga pendapatan per kapita Indonesia meningkat 13 kali selama 25 tahun itu.⁴

⁴Sudrajat A Suryana, et al., *Negeriku Begini Bangsaku Begitu*, (Jakarta Barat: Khanata, Pustaka LP3S Indonesia), 25.

Penurunan Lifting Minyak Bumi



Grafik 1.1. Presentase penurunan *lifting* minyak bumi 2012-2017

Lifting minyak mengalami penurunan disebabkan oleh tidak ditemukannya lapangan minyak baru.⁷ Selain itu, sumur-sumur minyak di Indonesia sudah semakin tua sehingga jumlah produksi minyak semakin berkurang. Hal inilah yang menjadi pendorong Indonesia harus melakukan impor minyak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Volume impor yang semakin meningkat dan biaya subsidi yang semakin tinggi, sedangkan penerimaan ekspor yang semakin rendah mengakibatkan biaya pengadaan minyak dan gas bumi semakin besar. Ketika harga minyak dunia melonjak diluar kewajaran dari anggaran pemerintah

Atas dasar pertimbangan ini, pemerintah mencabut subsidi minyak dan gas bumi dengan menaikkan harga minyak dalam negeri mengikuti harga minyak dunia. Peristiwa kenaikan harga minyak dan gas bumi selalu menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan kenaikan harganya memberikan dampak terjadinya inflasi yang tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Hal



Grafik 1.2. Defisit APBN 2018

gas bumi dengan menaikkan harga minyak dalam negeri mengikuti harga minyak dunia. Peristiwa kenaikan harga minyak dan gas bumi selalu menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan kenaikan harganya memberikan dampak terjadinya inflasi yang tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Hal

gas bumi dengan menaikkan harga minyak dalam negeri mengikuti harga minyak dunia. Peristiwa kenaikan harga minyak dan gas bumi selalu menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan kenaikan harganya memberikan dampak terjadinya inflasi yang tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Hal

⁸ Direktorat Penyusunan APBN, (Informasi APBN 2018), <http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 08 Juli 2018.

ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan karena telah menyebabkan biaya produksi meningkat juga adanya permintaan kenaikan upah dari para pekerja akibat meningkatnya biaya hidup, serta banyak perusahaan yang gulung tikar dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara tidak langsung, menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang sangat tajam. Dampak kenaikan ini telah merebak ke seluruh lapisan masyarakat di pelosok wilayah manapun. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pemerintah memberi bantuan dana kompensasi, ini dimaksudkan agar masyarakat miskin tidak semakin banyak. Namun, ibarat penyakit kronis, biang terjadinya kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan tampaknya nyaris tak tersentuh bahkan tidak mampu untuk disentuh. Kinerja perekonomian di berbagai wilayah tak kunjung membaik bahkan semakin meluas dan mendalam sampai berpengaruh pada aspek sosial masyarakat.⁹

Polemik kenaikan dan pencabutan subsidi minyak dan gas bumi sebenarnya merupakan dua persoalan ekonomi politik yang terkait dengan eksistensi negara. Negara ini telah masuk dalam lingkaran kuasa neoliberalisme dan globalisasi. Neoliberalisme dan globalisasi sejatinya berhulu dari lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.¹⁰

⁹ Karnaji, (Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM), *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, No. 4, (Oktober, 2005), 29.

¹⁰ S. Aminah, (BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme), *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, No. 4, (Oktober, 2005), 3.

Sejak saat itu, terjadi perubahan yang sangat fundamental tentang status penentuan harga migas yang semula ditangan negara, kini mengalami liberalisasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 ayat 2 UU nomor 22/2001, yang berbunyi " harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar". Meliberalisasi sektor hilir perusahaan migas seperti ini jelas-jelas mendahulukan pengusaha-pengusaha swasta dan asing. Liberalisasi juga tampak dalam pasal 9 yang berbunyi " kegiatan usaha hulu dan hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta". Dengan demikian, jika dicermati ternyata UU migas adalah akar dari masalah ini. Menurut Dirjen Migas, setelah era UU migas 22/2001, pemerintah telah berhasil menawarkan banyak sekali blok migas sehingga undang-undang tersebut sudah *on the track*.¹²

¹² Vega Aulia Pradita, (Revisi UU Migas: Tender Blok Migas Tidak cocok di Indonesia), <http://www.bisnis.com>, diakses pada 06 Agustus 2018.

Kondisi yang demikian tentu sangat berkaitan dengan aturan yang digunakan dalam suatu pemerintahan, yakni dalam konsep ekonomi kapitalis atau konvensional, sumberdaya alam khususnya minyak dan gas bumi dihukumi sebagai kepemilikan pribadi hal ini disebabkan prinsip dasar dalam ekonomi kapitalis yakni mengandung asas kebebasan yang berarti setiap individu bebas memiliki apa saja yang dia kehendaki asal dia memiliki modal / kekuasaan/ kekuatan untuk menguasainya, maka tidaklah heran jika kondisi perekonomian hari ini mensejahterakan segelintir orang saja.

Jika diamati, perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka hal itu tidak terlepas dari perbedaan tingkat pemikiran manusia saat itu. Konflik antarmanusia, antarsuku, antarbangsa atau antaragama adalah hal yang wajar terjadi dilihat dari keragaman pemikiran dalam masyarakat. Namun, dari berbagai perubahan yang terjadi, perbedaan ideologilah yang tampak banyak mempengaruhi perubahan tersebut. Terjadinya perang dingin antara blok barat (kapitalis) dan blok timur (sosialis-komunis) yang melibatkan sejumlah negara selama bertahun-tahun menunjukkan bukti tersebut.

Dengan berakhirnya perang dingin, kini ideologi kapitalis yang dimotori Amerika Serikat berusaha menjadikan ideologinya sebagai landasan berpikir bagi semua negara di dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa ideologi kapitalis bersifat universal seperti yang digambarkan oleh Samuel P.Huntington dalam tesisnya. Amerika Serikat lewat berbagai media

Ketika pengelolaan minyak dan gas bumi ini diserahkan kepada swasta, maka jawabannya dapat dilihat dalam kelanjutan hadis diatas. Dari hadis diatas ada tambahan kalimat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas dari Ibn Abbas

حدیث ابن عباس وزاد فیہ: وثمنہ حرام)

Maknanya adalah mengambil ثمن yaitu keuntungan dari harga yang diambil dengan menjual komoditas tersebut hukumnya adalah haram. Namun, jika negara tidak bisa melakukan subsidi silang, maka negara hanya boleh

[illegible]

a. *Selected Index Reading*

Selected index reading dengan cara memahami daftar isi literatur atau melalui index tentang kata-kata dalam literatur itu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara membaca, mengkaji, mempelajari dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan, antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁹ Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah saja. Peneliti mengambil data yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam khususnya minyak dan gas bumi baik dari sisi sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

²⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

Bab kelima, berisikan simpulan dan saran, yakni mengemukakan simpulan dari bahasan penelitian dan memberikan saran atau masukan atau kritik membangun yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

Dari beberapa definisi tersebut maka diperoleh hal mendasar yang membangun sistem ekonomi kapitalisme yaitu:

- 1) Kebutuhan itu tidak terbatas sedangkan sarana pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga harus menggunakan segala yang ada untuk memuaskan kebutuhan manusia.
- 2) Adanya kebebasan dalam kepemilikan, segala sesuatu dapat dimiliki seorang individu atau swasta selama dia mampu untuk memenuhinya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang memegang peranan utama dalam prinsip ekonomi, yang memegang inisiatif dalam proses produksi adalah individu atau swasta. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban menjaga keamanan umum, supaya orang bebas, berusaha dan berdagang. Yang harus dijaga pemerintah adalah keselamatan jiwa, keselamatan harta dan keselamatan hak milik yang dipandang "*inviolable et sacre*" menurut istilah revolusi Prancis dari abad ke-18 yaitu hak milik perseorangan di pandang suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Dengan adanya kebebasan berusaha dan dilindungi hak milik perseorangan, maka sebagai akibat dari bekerjanya motif ekonomi

akan tercapailah, dalam proses persaingan "*laissez faire, laissez aller*" artinya biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas.⁴

mendapatkan penghasilan yang memadai, apalagi sejumlah pengusaha memberikan penghasilan sama dengan besarnya konsumsi mereka maka tidak ada sisa untuk menabung. Dengan kondisi ini, masa depan anak keturunan pekerja tidak bisa lebih baik kesejahteraannya.¹⁴

kemurah hatian, dan amanah terabaikan dan berganti menjadi mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, kebencian, kebohongan, dan saling tidak percaya. Kapitalisme inilah yang merupakan bagian dari kediktatoran uang.²⁰

sangat menolak sikap monopoli dan proteksionisme yang dapat mengganggu iklim usaha dan menjadikan usaha pada tingkat persaingan yang tidak sehat.²¹

c. Eksploitasi

Hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Penindasan ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah sudah menjadi pemandangan sehari-hari di dalam masyarakat kapitalis. Pekerja ditindas oleh majikan, petani diperas oleh tuan tanah, si miskin dieksploitasi oleh si kaya, penjarahan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi yang tiada berbilang jumlah dan waktunya, rakyat ditindas oleh penguasanya, dan diatas semua itu, semua keuangan negara dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan. Harta adalah agama bagi setiap orang dan mendapatkannya melalui cara yang baik atau curang menjadi persaksiannya yang berakibat setiap orang menindas orang lain dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak mungkin.²²

²¹ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, (Yogyakarta, UINSUKA Press, 2007), 89.

²²Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi...*, 360.

⁴⁵Abdurrahman Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 80.

1. Harta milik umum yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau, dan terusan / kanal yang besar.
2. Harta milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan memerlukan biaya dan usaha yang keras untuk mengeluarkannya seperti minyak dan gas bumi dan barang-barang tambang, karena itu, negara yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili kaum muslim. Kemudian menyimpannya di *bayt al- Mal* kaum muslim dan khalifah yang memiliki wewenang untuk mendistribusikan hasilnya.

Islam mewajibkan berputarnya kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya berputarnya kekayaan hanya pada segelintir orang.⁵⁵

⁵⁵ Ibid, 168.

yang beredar ditarik dari pasar sehingga sulit diperoleh masyarakat maka yang terjadi adalah pertukaran tidak akan berlangsung dan roda perekonomian akan terhenti.

2) Pemberlakuan uang tanpa jaminan

Mata uang yang layak digunakan adalah emas (dinar) dan perak (dirham) atau bentuk lain dengan jaminan emas. Mata uang kertas atau *flat money* yang tidak dijamin atau tidak dapat ditukar dengan emas dan perak tidak dapat dijadikan sebagai mata uang karena sifatnya berubah sewaktu-waktu dan memicu spekulatif. Emas dihargai, sebagai komoditi dengan daya jual tinggi karena investor dari seluruh penjuru dunia memburu dan menginginkannya sebagai alat investasi.⁶⁴ Suatu saat uang beredar dalam jumlah berlebih dan pada saat lain dalam jumlah minimal karena dipicu aksi jual dan simpan secara besar-besaran, maka sejalan dengan larangan penimbunan emas dan perak serta larangan melakukan praktik jual beli mata uang secara tidak kontan. Diharapkan uang bisa beredar di masyarakat sebagai alat tukar bukan komoditi.

3) Hubungan luar negeri

Sistem ekonomi Islam telah mengatur negara untuk tidak melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak asing dalam melakukan

⁶⁴ M. Luthfi Hamidi , *Gold Dinar : Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), 82.

terutama dosa besar seperti riba, perampasan hak, pencurian dan kedzaliman kaum kuat terhadap kaum lemah.⁶⁶

¹Mustika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 4-5.

Penelitian ini digunakan ketika kita berhadapan dengan suatu karya atau eks yang terdapat jarak baik jarak bahasa, jarak konsep, jarak waktu dan jarak geografis. Adanya jarak inilah yang menyebabkan tidak bisa langsung memahami konsep yang terdapat dalam teks tersebut.⁶ Oleh karena itu, kerangka yang dipakai dalam penelitian ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan teks berupa data-data yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kajian pustaka karena penelitian ini didasarkan pada data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek studi. Sumber data primer penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan teori kepemilikan dalam ekonomi kapitalis dan Islam antarlain *Al-Nizam al-Iqtishadi fi al Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah* oleh Abdul Qadim Zallum.

Adapun sumber-sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah

⁶Khozin Affandi, *Hermenutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik*, (Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 54.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data dapat diperoleh dengan *selected index reading* dan dokumentasi yaitu:

- Selected Index Reading*
Selected index reading dengan cara memahami daftar isi literatur atau melalui index tentang kata-kata dalam literatur itu.
- Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara membaca, mengkaji, mempelajari dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

F. Teknik Analisis Data

Dokumentasi adalah cara membaca, mengkaji, mempelajari dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

Penelitian menggunakan analisis data model analisis Philip Mayring. Kerangka kerja analisis ini mengembangkan aspek interpretatif, kategori terdekat dengan materi kemudian merumuskannya dengan istilah-istilah dari materi tersebut. Analisis kualitatif ini mengembangkan prosedur kategori

ANALISIS DATA

Sektor migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara juga sebagai sektor pemenuhan kebutuhan rakyat akan energi menjadi sektor yang sangat penting karena sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi dan energi nasional.¹ Dalam perkembangan pengelolaannya, sebelum tahun 2001 tata kelola migas diatur oleh UU No.8 Tahun 1971,² pemerintah sebagai satu-satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan pengusahaan migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu yang bertugas dan melayani kebutuhan bahan bakar dalam negeri.

aswa, et al., *Surviving Crisis: A Quest For Prosperity Indonesia's Economic Review 2004-*
(Jakarta: Indonesia Finance Today, 2012), 112.

Pudjo Utomo, *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contract Indonesia*, (Jakarta:
Miner Institute, 2010), 254.

Minulya, " Outlook Migas 2013: Menggantungkan Asa Pada UU Revisi", *Majalah Indonesian
Economic Magazine*, Edisi VI. (20 Januari-20 Februari 2013),.

³ Budi R. Minulya, " Outlook Migas 2013: Menggantung Asa Pada UU Revisi", *Majalah Indonesian Petroleum Magazine*, Edisi VI, (20 Januari-20 Februari 2013),.

- 1) kepemilikan individu,
- 2) kepemilikan umum,
- 3) dan kepemilikan negara.

[illegible]

الناس شركاء في ثلاث : في الكلاء والماء والنار (رواه احمد ابو دود و رجاله ثقات)

'illat kepemilikan dari hadits tersebut adalah jumlah yang besar (sesuatu yang bersifat bagaikan air yang mengalir). Berdasarkan hadits diatas maka, sumberdaya energi yaitu migas termasuk dalam kepemilikan umum karena dua aspek yaitu migas termasuk dalam kata api (sumber energi), dan migas merupakan hasil dari minyak bumi yang tersedia dalam jumlah besar, karena sumberdaya energi (minyak bumi, gas alam, batubara, nuklir, geotermal) termasuk dalam kepemilikan umum maka aktivitas pertambangan sumber daya energi merupakan industri milik umum.

⁷ Muhammad bin 'alawy bin Muhammad al- Shawkani, *Nayl al- Awthar*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), vol. 6, 1649.

al-maal) dari sektor kepemilikan umum. Semua hasil dari industri milik umum, langsung dimasukkan kedalam *bayt al-maal* (anggaran negara).⁹

Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam, negara harus mendanai semua industri milik umum dan menerima secara penuh semua penghasilan dari industri-industri tersebut, sekedar *sharing* keuntungan. Sebagian industri milik umum yang menanggung pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat harus mengalami defisit "*cash flow*" yaitu pengembalian dana ke anggaran negara lebih kecil dari pada pendanaan negara untuk industri tersebut. Namun hal ini, dapat ditutup dengan adanya pemasukan dari sektor industri milik umum lainnya yang tidak menanggung beban pemenuhan kebutuhan pokok umum. Secara keseluruhan negara harus mengatur supaya pengelolaan keseluruhan industri milik umum mampu menghasilkan "*positif cash flow*" yaitu memberikan keuntungan bersih bagi anggaran negara yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai pemenuhan kebutuhan pokok umum seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan sarana-prasarana umum.

B. Perbedaan Mendasar Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Antara Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Sistem Ekonomi Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut :

Pertama, prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis, dalam konsep kepemilikan yaitu prinsip kebebasan, yang menurut ekonomi kapitalis dapat

⁹ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mdzab Hamfara Jilid 1*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2012), 404.

um telah menerapkan berbagai aturan seperti men
arang perolehan harta secara haram seperti mencuri
um, melarang penimbunan harta dan sebagainya.¹³

¹³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam...*, 361.

- c) Konsep distribusi yaitu sistem ekonomi kapitalis menjadikan mekanisme pasar sebagai peranan penting dan menolak peranan negara dalam perekonomiannya, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu peranan negara menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu perekonomiannya dan negara akan menjamin setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Saran

Melihat permasalahan pengelolaan minyak dan gas bumi yang terjadi saat ini, sesungguhnya kondisi ini tidak akan pernah selesai, sebelum pemerintah segera melakukan revisi dan kaji ulang UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menjadi carut marut yaitu ketika pengelolaan minyak dan gas bumi diserahkan kepada asing yang mana bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu barang tambang termasuk kepemilikan umum yang berarti negara harus mengelola minyak dan gas bumi serta mengembalikan keuntungannya kepada rakyat.

Kemudian, langkah yang harus dilakukan adalah membatalkan kontrak terhadap perusahaan-perusahaan asing dan mengambil alih kepemilikan perusahaan minyak dan gas bumi yang dikuasai oleh asing. Dengan mengubah kepemilikan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke negara, maka hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Munawwir,, *Kamus Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdul Mannan, Muhammad, *"Islamic Economics, Theiry and Practice"*, Cambridge: Hodder and Stouhton, 1986.
- Abdurrahman, Hafidz, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al- Azhar Press, 2014.
- Affandi, Khozin, *Hermenutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik*, Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Al- Ghazali, *al- Iqtishad Fi al- I'tiqad*, Libanon: Dar al- kutub al- Ilmiyah, 1988.
- 'Alawy bin Muhammad al- Shawkani, Muhammad bin, *Nayl al-Awthar*, Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini (terj)*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- , *Economic System of Islam*, Lahore: Islamic Publication (PVT) Limited, 1984.
- An- Nabahan, M. Faruq, *"Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme "*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- An- Nabhani, Taqiyuddin, *"Sistem Ekonomi Islam"*, Bogor: Al- Azhar Press, 2009.
- , *al- Nidzam al- Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: Min Mansyurat Hizb at- Tahrir, 1963.
- A Suryana, Sudrajat, et al., *Negeriku Begini Bangsaku Begitu*, Jakarta Barat: Khanata, Pustaka LP3S Indonesia, 2005.
- Aulia Pradita, Vega, (Revisi UU Migas: Tender Blok Migas Tidak cocok di Indonesia), <http://www.bisnis.com>, diakses pada 06 Agustus 2018.
- Badri, Sofyan, " Produksi Migas Terus Merosot", *Majalah Geo Energi*, (November, 2012).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Penyusunan APBN, (Informasi APBN 2018)<http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 08 Juli 2018.
- Ebensten, William dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini (terj)*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Endayani, Sri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Skripsi–IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Esach, Farid, *Liberation & Pluralism*, Oxford: One Word, 1997.

